

**Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat Miskin Di
KotaBandar Lampung**

(Studi Kasus: Kecamatan Panjang Kelurahan Ketapang)

**Oleh
DERI MAULIDI RAMADHAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS: KECAMATAN PANJANG, KELURAHAN KETAPANG)

Oleh

DERI MAULIDI RAMADHAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menghadapi masalah kemiskinan. Salah satu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran distribusi. Salah satu program yang dilakukan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, serta menggunakan uji Validitas dan uji Reliabilitas. Metode Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan editing, coding, skoring, dan tabulasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebesar 54.60% yang termasuk dalam kategori efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Ketepatan Dana, Ketepatan Sasaran, Sosialisasi

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM FOR THE POOR IN BANDAR LAMPUNG CITY (CASE STUDY OF PANJANG SUB-DISTRICT, KETAPANG URBAN VILLAGE)

BY

Deri Maulidi Ramadhan

Abstract- indonesia is a developing country that is facing poverty. One of the roles of the government in alleviating poverty is the role of distribution. One of the government's programmes is the Family Hope Programme (pkh). The aim of PKH is to help reduce poverty by providing conditional cash transfers to poor families. This research aims to analyse the effectiveness of the Family Hope Program on the poor in Bandar Lampung City. This type of research is descriptive qualitative research. This research uses primary data. The data collection methods used in this study are observation, interviews, documentation, and questionnaires, and use the Validity test and Reliability test. Data processing methods in this study use editing, coding, scoring, and tabulation. The result of this study is 54.60% which is included in the effective category.

Keywords: *Effectiveness, Accuracy of Funds, Accuracy of Target, Socialisation*

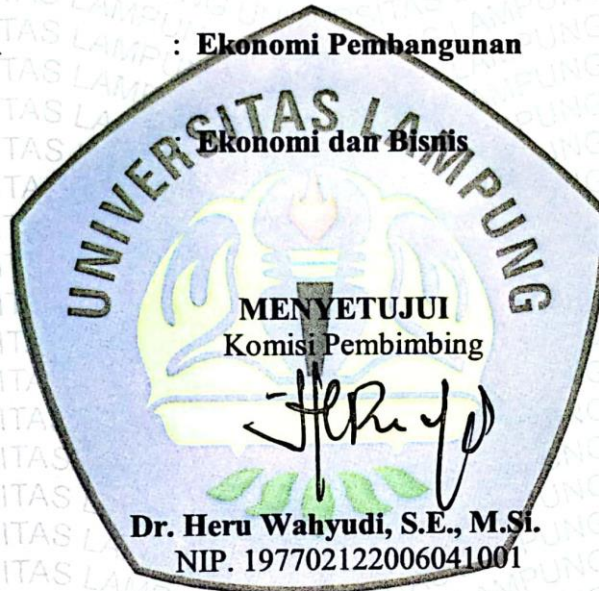
Judul Skripsi : Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kecamatan Panjang, Kelurahan Ketapang

Nama Mahasiswa : Deri Maulidi Ramadhan

No. Induk Mahasiswa : 1711021059

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENGETAHUI

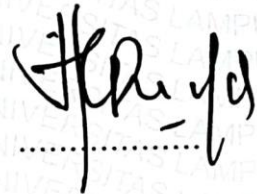
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

[Signature]
Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M
NIP. 19800705 200604 2 002

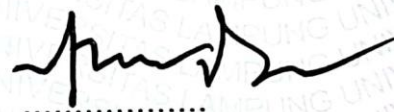
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Nelli Aida, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairabi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024



DERI MAULIDI RAMADHAN

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Desember 1998, yang menjadikan dia anak ketiga dari tiga bersaudara. Orang tua penulis adalah Bapak Chairullah dan Ibu Sri Haryanti. Selain penulis, dalam keluarga tersebut terdapat dua kakak laki laki yang bernama Muhammad Dedi Pratama dan Randa Prastyawan. Dengan demikian, Penulis adalah anak bungsu atau anak terakhir dalam keluarga tersebut.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2004 di TK Arusdah dan diselesaikan pada tahun 2005. Selanjutnya, dari tahun 2005 hingga 2011, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sawah Brebes, Bandar Lampung. Tahun 2011 hingga 2014, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 5 Kota Bandar Lampung. Setelah itu, dari tahun 2014 hingga 2017, penulis meneruskan pendidikannya di SMAN 6 Kota Bandar.

Setelah berhasil lulus pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung, Jurusan Ekonomi Pembangunan, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2019, penulis menjalani Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Museum Bank Indonesia, dan Mata Najwa. Pada tahun 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis aktif dalam beberapa kegiatan organisasi, antara lain pada tahun 2017 menjadi anggota tetap

Himepa FEB Unila, aktif sebagai anggota UKM-F KSPM FEB Unila dan aktif dalam kepanitian kegiatan acara yang dilaksanakan pihak jurusan Ekonomi Pembangunan juga Pihak KSPM.

MOTTO

“Hidup Seperti bunga teratai, tumbuh cantik walaupun hidup di lumpur”

–Deri

“Find joy in the little things”

–Deri

“Saat kita punya harapan, maka kita akan fokus mencapai tujuan hidup”

–Deri

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmaniirahim. Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, aku persembahkan karya sederhana ini dengan segala kerendahan hati

kepada:

Untuk kedua Orang Tuaku Bapak Chairullah dan Ibu Sriharyanti

atas segala kasih sayang yang tiada batas, atas segala peluh, do'a terbaik yang selalu dilangitkan, semangat dan pengorbanan. Terima kasih selalu ada, menjadipenyemangat dan panutan yang sangat luar biasa untuk setiap langkah yang ku lalui selama ini. Berkat Bapak & Ibu lah semuanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.

Untuk abangku Randa Prastyawan dan seluruh orang-orang terdekat, serta teman-teman seperjuangan. Terimakasih atas semua kesabaran, dukungan, kesaan, semangat, waktu, motivasi, dan doa yang senantiasa diberikan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, motivasi, nasehat, semangat dan teladan. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kecamatan Panjang, Kelurahan Ketapang)” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam menulis skripsi ini penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T. S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. dan ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi juga dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, ilmu, motivasi, nasihat, semangat dan waktu untuk membimbing penulis didalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak Ibu.
4. Ibu Neli Aida S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, saran, dan nasihatnya yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak Ibu.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. selaku dosen penguji dan pembahas yang telah senantiasa memberi pengarahan, kritik, dan saran serta

dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. SSP. Pandjaitan, Pak Yoke, Pak Toto, Pak Wayan, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Yudha, Pak Saimul, Pak Thomas, Ibu Betty, Ibu Irma, Ibu Emi, Ibu Zulfa, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Mba Mimi, Pak Kasim. Mba Dike dan Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk orangtuaku tercinta, Ayah Chairullah dan Ibu Sri Haryanti yang selalu memberikan dukungan, do'a restu dan memberikanku kekuatan yang luar biasa dalam setiap langkah yang ku lalui, serta abangku Randa. Terima kasih untuk kasih sayang yang tiada akhir.
9. Terimakasih kepada sahabat Bohe dan Wolf (Abhila, Abay, Ami, Annasti Daffa, Della, Diki, Ilham, Jayus, Junior, Kahla, Ken, Rezon, Rafif, Sarah, Sasti, Tania, Tegar). Semoga kesan yang ditinggalkan akan selalu jadi alasan untuk kembali bertemu, sukses semua.
10. Kepada Devita, Agie, Angga, Solihin, Pedro, Baitul, Aldo. Terimakasih yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesahku. Moga hidup kalian diberi kebahagiaan.
11. Kepada sobat Sukses (Chyntia, Jihan, Indri, Refdan, dan Oki). Terimakasih telah memberikan warna baru dalam pertemanan.
12. Teman teman SARJANA ENDING EP Angkatan 17 (Pebri, Robi, Azka, Nina, Arif, Aziz, Firman, Fitria, Herza, Mela, Isma, Lely, Rifki, Fera, Rahayu, Rida, Ella, Kahla, Gege, Arvenda, Muti, Nabila, April, Putri, Rais, Reza) dan teman teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu satu terimakasih atas waktu, kerjasama,

teman belajar, berpetualang, serta kenangannya.

13. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024

Penulis

Deri Maulidi Ramadhan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	13
C Tujuan Penelitian.....	13
D Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A Peran Pemerintah Dalam Perekonomian.....	14
B Pengeluaran Pemerintah.....	16
C Konsep Efektivitas.....	17
D Subsidi	20
E Definisi Kemiskinan	21
F Program Keluarga Harapan.....	23
G Peneliti Terdahulu	28
H Kerangka Pemikiran	33
III. METODE PENELITIAN	34
A Objek Penelitian	34
B Jenis Penelitian.....	34
C Alat Analisis.....	35
D Sumber Data.....	38
E Metode Pengambilan data.....	39

F	Populasi & Sampel	40
G	Teknik Pengolahan Data	41
H	Instrumen Penelitian	42
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A	Karakteristik Responden.....	43
B.	Uji Validitas dan Reabilitas.	51
C.	Hasil Perhitungan	53
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (2021-2022)	8
1.2	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung (2021-2022).....	8
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan	12
1.4	Jumlah Penduduk Pra Sejahtera per Kecamatan	14
2.1	Kriteria Penerima PKH.....	29
2.2	Penelitian Terdahulu.....	35
3.1	Variabel dan indikator item	39

DAFTAR GAMBAR

4.1	Rata rata Responden menurut jenis kelamin.....	32
4.2	Rata Rata responden menurut status dalam keluarga	47
4.3	Rata rata Responden menurut jumlah anggota.....	48
4.4	Rata rata Responden menurut usia	48
4.5	Rata rata Responden menurut Pendidikan terakhir	50
4.6	Rata rata Responden menurut status pekerjaan.....	51
4.7	Rata rata Responden menurut suku daerah.....	52
4.8	Rata rata Responden menurut pendapatan	52

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah utama yang dihadapi masyarakat modern adalah kemiskinan, yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk terlibat dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi serta berpartisipasi dalam masyarakat. Namun, definisi kemiskinan lebih dari sekadar berada di bawah norma kesejahteraan dalam hal pendapatan dan konsumsi. Seseorang atau sekelompok orang dianggap miskin jika tidak mampu menggunakan hak-hak dasarnya untuk menegakkan dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk menilai kemiskinan, banyak negara, termasuk Indonesia, menggunakan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Metode ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. (Tlonaen et al., 2014)

Ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimal adalah kemiskinan. (Mudrajad Kuncoro, 1997). Teknik apa pun yang digunakan akan menentukan seberapa besar standar minimum yang seharusnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mendasarkan salah satu perhitungannya pada jumlah rupiah yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan dan minuman, dengan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari (dari 52 jenis komoditas yang diperkirakan mewakili pola konsumsi penduduk tingkat terendah.) dan konsumsi non-makanan (dari 45 jenis komoditas yang dianggap pangan menurut kesepakatan nasional dan tidak membedakan perkotaan dan perdesaan).

Ambang batas kalori 2100 berlaku untuk orang-orang dari berbagai usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan kondisi fisiologis yang diproyeksikan. Metrik ini biasa disebut dengan garis kemiskinan. (Suparman et al., 2021)

Menurut Sharp, et.al (dalam Kuncoro, 1997:131) melihat penyebab kemiskinan dari sudut pandang ekonomi. Pada tingkat mikro, kemiskinan terjadi akibat pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata, sehingga menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Orang-orang miskin mempunyai sedikit sumber daya dan kualitasnya buruk. Kedua, disparitas kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya gaji. Buruknya kualitas sumber daya ini dapat disebabkan oleh prasangka, kurangnya pendidikan, nasib buruk, atau warisan. Ketiga, kesenjangan akses terhadap modal merupakan akar penyebab kemiskinan. Istilah “garis kemiskinan” mengacu pada ketiga faktor tersebut. (Kuncoro 1997:131).

Tingkat dimana seseorang tidak mampu memperoleh pendapatan di atas garis kemiskinan yang ditetapkan disebut garis kemiskinan (poverty line). Kebutuhan pokok akan pangan, sandang, dan papan merupakan dasar penghitungan garis kemiskinan. Di Indonesia, terdapat ambang batas kemiskinan yang dinaikkan setiap tahun berdasarkan keadaan pada tahun tersebut. (Adji et al., 2020).

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menghadapi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu tujuan negara Indonesia adalah meminimalisir kemiskinan guna mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya. Menguasai dan memelihara aparatur negara untuk mengatur warga negaranya adalah tujuan negara. Tujuan setiap negara ditentukan oleh kondisi negaranya, termasuk dokumen pendirian negara dan jumlah penduduknya, serta faktor eksternal. (Suharto, 2008:23). Selain itu tujuan

suatu negara juga disampaikan oleh Wicaksono (2006:18), secara khusus menetapkan keadaan yang memungkinkan individu untuk sepenuhnya memenuhi keinginan mereka (Burhanuddin, 2021)

Lampung adalah salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Beberapa variabel berkontribusi terhadap hasil ini. Lampung masih kekurangan sumber daya manusia, termasuk masyarakatnya. Secara sosial dan politik, masyarakat Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah kemiskinan. Provinsi Lampung telah lama bergelut dengan persoalan kemiskinan. Kemiskinan pada tahun 2014–2015 disebabkan oleh sejumlah permasalahan, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas lapangan kerja, upah yang sangat rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata, kurangnya prospek kerja, dan lingkungan politik yang tidak menentu. (BPS 2016:5).

Suyanto (2013) menjelaskan Segala upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus mempunyai pendekatan yang holistik dan berjangka panjang terhadap permasalahan kemiskinan. Untuk menentukan permasalahan utama yang dihadapi suatu kelompok masyarakat, kriteria kemiskinan diperiksa. Dari segi sebaran spasial, pembangunan di Indonesia belum merata. Ada provinsi tertentu yang dianggap progresif, namun ada pula yang tertinggal. (Suyanto, 2013)

Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) menurut provinsi 2021-2022

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi

NO.	PROVINSI	2021	2022
1	Aceh	850.26	818.47
2	Sumatera Utara	1273.07	1262.09
3	Sumatera Barat	339.93	343.82
4	Riau	496.66	493.13
5	Jambi	279.86	283.82
6	Sumatera Selatan	1116.61	1054.99
7	Bengkulu	291.79	292.93
8	Lampung	1007.02	995.59
9	Kep. Bangka Belitung	69.70	69.69
10	Kep. Riau	137.75	148.89

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021,2022)

Berdasarkan tabel diatas bahwa total masyarakat miskin yang berada di Provinsi Lampung masih terbilang tinggi yaitu ditahun 2021 mencapai 10007.02 dan 2022 mencapai 995.58 ribu jiwa. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	2021	2022
1	Lampung Selatan	145.85	136.21
2	Lampung Tengah	155.77	143.34
3	Lampung Utara	121.91	114.67
4	Lampung Barat	39.36	36.20
5	Tulang Bawang	44.53	39.19
6	Tanggamus	71.89	67.43
7	Lampung Timur	159.79	149.12
8	Way Kanan	59.89	54.28
9	Pesawaran	68.31	63.17
10	Pringsewu	41.04	38.18
11	Mesuji	15.24	13.88
12	Tulang Bawang Barat	23.03	20.72
13	Pesisir Barat	23.23	21.85
14	Bandar Lampung	98.76	90.51

Sumber : BPS, 2021-2022

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) diatas bahwa di Provinsi Lampung terdapat 5 kabupaten yang mengalami jumlah kemiskinan yang cukup tinggi yakni Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Bandar Lampung. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk terus mengurangi angka kemiskinan.

Fungsi distribusi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang mengharuskan pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Salah satu jenis belanja pemerintah adalah transfer/subsidi, yang seringkali diartikan sebagai pajak negatif, sehingga penerima subsidi mengalami peningkatan pendapatan riil jika mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi pemerintah dengan harga jual yang rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang terus-menerus selama bertahun-tahun. Secara historis, masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan makanan, namun karena kekurangan kenyamanan atau harta benda lainnya. Mereka tidak memiliki akses terhadap institusi pendidikan, layanan kesehatan,

dan fasilitas lain yang dimiliki masyarakat saat ini. Kemiskinan adalah penyakit sosio-ekonomi yang mempengaruhi negara-negara berkembang dan maju. (Antania, 2010).

Mengingat hal ini, pemerintah tidak tinggal diam; sebaliknya, pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perbaikan seperti ini, jelas bahwa Indonesia dapat menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Salah satu program pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang diperkenalkan pada tahun 2007. Pemerintah berharap melalui PKH, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menerima dana bantuan untuk menyekolahkan anak-anaknya dan mengakses layanan kesehatan yang baik. PKH berbentuk dukungan moneter, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam melembagakan jaminan sosial dan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). (Dehani et al., 2018)

Tujuan dari PKH, sebuah program bantuan sosial bersyarat, adalah memberikan akses KPM kepada ibu hamil dan anak kecil sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya dan layanan pendidikan (fasdik) yang dekat dengan rumah mereka. Demi menjaga kesejahteraan sosial dan memenuhi nawacita serta kewajiban konstitusi Presiden Republik Indonesia, masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas juga menjadi sasaran manfaat PKH kali ini. (Kementerian Sosial, 2021).

KPM tidak hanya didorong untuk memanfaatkan layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, namun KPM PKH juga terus dibantu untuk memperoleh lebih banyak program. Tujuan PKH adalah menjadikan dirinya sebagai pemimpin dalam upaya Indonesia memerangi

kemiskinan. Upaya berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan KPM PKH adalah sinergi antara kegiatan perlindungan sosial dan pemberdayaan.

Kebijakan Program Keluarga Harapan pada awalnya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2007, kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017. Kebijakan ini selanjutnya diperbarui menjadi Menteri Sosial. Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial dalam keadaan bantuan sosial diberikan secara tunai berdasarkan penetapan penyediaan bantuan sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Elia, 2021)

Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kelompok lingkungan yang sangat miskin dengan memberikan dukungan keuangan bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah yang mencari akses terhadap program kesehatan dan pendidikan tertentu. Dana bantuan Keluarga Harapan merupakan investasi untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan generasi penerus, serta mengurangi beban keuangan rumah tangga berpendapatan rendah dalam jangka pendek. Pemerintah berharap Program Keluarga Harapan mampu mengakhiri siklus kemiskinan generasi. (Londah et al., 2018)

Seperti paparan diatas, bahwa rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan pendapatan seringkali dikaitkan dengan kemiskinan. Peningkatan pendidikan dan kesehatan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing. Pendidikan dapat memberikan kemungkinan pertumbuhan melalui penguasaan informasi dan kemampuan pendidikan. Setiap orang yang memperoleh pendidikan yang layak akan mempunyai informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk memperoleh karir yang lebih baik. Dengan cara ini, setiap orang akan dapat meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan pada akhirnya keluar dari kemiskinan.

Tabel 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bandar Lampung, 2020-2022
Net Participation Rates and Gross Participation Rates by Educational Level in Bandar Lampung Municipality, 2020-2022

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/Sederajat			
Primary School	99	99	99
SMP/MTs/Sederajat			
Lower Secondary School	82	84	84
SMA/SMK/MA/Sederajat			
Upper Secondary School	70	70	70

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Berdasarkan statistik BPS, tingkat pendidikan di Kota Bandar Lampung masih tergolong buruk yaitu pada tingkat menengah atas. Lebih banyak masyarakat yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dibandingkan yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama atau atas. Pada tahun 2022, APM SD sebesar 99%, SMP sebesar 84%, dan SMA sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

Salah satu tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan kesehatan, yang juga membantu mengentaskan kemiskinan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan, sementara kemiskinan mempunyai kemampuan untuk berkontribusi terhadap rendahnya kesehatan. Kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas dan menguras keuangan rumah tangga, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dan menimbulkan

kemiskinan. (Wagstaff, 2013). Di sisi lain, mereka yang miskin menghadapi peningkatan bahaya terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka, serta meningkatnya kelaparan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, dan penurunan produktivitas. Pendapatan menjadi semakin terbatas akibat menurunnya produksi. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai jalannya terapi. Individu yang bersangkutan pada akhirnya menjadi semakin miskin atau terpaksa masuk ke dalam siklus kemiskinan sebagai akibat dari keadaan ini. (Wagstaff, 2013)

Salah satu penyebab kemiskinan di Desa Ketapang Kecamatan Panjang adalah kurangnya sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya daya saing dalam mengejar peluang karir. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan merupakan dampak dari permasalahan ini. Buruknya kondisi kesehatan dan pendidikan di sebagian besar masyarakat menjadi penyebab rendahnya sumber daya manusia.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Pra Sejahtera per Kecamatan



Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2020

Kecamatan panjang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak 2020 di kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 4121 orang. Sedangkan yang paling sedikit yaitu kecamatan enggal sebanyak 991 orang. Salah satu penyebab tingginya tingkat masyarakat prasejahtera di kecamatan Panjang adalah minimnya pendapatan yang dikarenakan pekerjaan masyarakat tersebut adalah wiraswasta, buruh, ART dan masih banyak juga masyarakat yang tidak bekerja. Untuk itu kecamatan panjang menjadi kota dengan alokasi dana PKH terbanyak di kota Bandar Lampung khususnya kelurahan Ketapang yang akan menjadi objek penelitian.

Salah satu kelurahan yang terbanyak dalam alokasi dana PKH adalah ketapang. Dimana jumlah penerima PKH di kelurahan tersebut mencapai 206 orang. Sebab, masih banyak masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut yang membutuhkan bantuan tersebut. Banyaknya orang yang tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga menjadi salah satu alasan mengapa kelurahan Ketapang menjadi yang terbanyak dalam mengalokasikan dana PKH ini.

Oleh karena itu, PKH diyakini akan mempengaruhi pandangan orang tua tentang nilai pendidikan dan kesehatan, memungkinkan mereka untuk mendorong anak-anak mereka untuk terus belajar di masa depan dan memberikan mereka arahan tentang bagaimana mengoptimalkan pendidikan sekaligus menekankan pentingnya pendidikan. kesehatan. Permasalahan kesehatan yang buruk dan terabaikan dapat memenjarakan masyarakat dalam siklus kemiskinan. Mengembangkan kriteria rumah kurang mampu merupakan komponen penting dari program PKH. Kejanggalaan dalam pendataan kelompok masyarakat kurang mampu penerima bantuan PKH, seperti disparitas pemberian bantuan PKH, merupakan permasalahan yang sering terjadi. Indikator yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan PKH untuk masyarakat miskin yaitu menggunakan definisi dari BPS.

1. Sebuah bangunan tempat tinggal mempunyai luas lantai kurang dari 8 meter persegi.
2. Air sumur merupakan sumber air minum.
3. Frekuensi makan sebanyak 2 kali sehari
4. Tidak mampu menanggung biaya pengobatan anggota keluarga di fasilitas kesehatan
5. Makan daging, susu, atau ayam tidak lebih dari sekali seminggu.
6. kurangnya fasilitas untuk buang air besar
7. Kayu bakar, arang, atau minyak tanah adalah sumber bahan bakarnya.
8. dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu kali

Pemerintah menggunakan indikator ini antara lain untuk mengidentifikasi rumah sasaran bantuan. Selain itu, masyarakat juga belum mendapatkan sosialisasi atau pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan program wajib sekolah 12 tahun, dan masih banyaknya perempuan yang tidak mengetahui tentang kehamilan serta tumbuh kembang anak mereka yang berusia balita.

Keberhasilan program PKH diukur dari seberapa baik penerima subsidi mampu meningkatkan kesejahteraannya, seberapa cepat manfaatnya disalurkan selama tiga bulan, seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat—terutama rumah tangga miskin—seberapa baik program tersebut. mekanisme yang dijalankan, dan ada tidaknya kejanggalan yang konon dilakukan oknum tertentu di Desa Ketapang. karena banyaknya keluhan yang dilontarkan oleh mereka yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Mereka mengira bahwa bantuan ini diberikan kepada oknum tertentu atau keluarga terdekat selaku RT/RW setempat. Bukan hanya itu permasalahan juga terjadi kepada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan PKH untuk itu sendiri.

Berdasarkan dari jurnal terdahulu seperti yudid B.S.Tlonanen, Nurul Najidah, Greacella Alda Rahma, Junaidi Kariono, Fika Nurahmawati yang membahas

tentang Program Keluarga Harapan dan bantuan Langsung Tunai dimana hasil dari penelitian mereka memperlihatkan hasil positif terhadap program tersebut untuk kalangan masyarakat miskin dimana program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dijurnal lainnya seperti Apando Ekardo, Irwan Akib, dan Hastina Fenriaty menunjukkan hasil yang negatif yang mana program tersebut masih belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dikarenakan masih banyak masyarakat yang menggunakan dana tersebut dengan keperluan lain yang tidak berhubungan dengan Tujuan PKH

Mekanisme ini berkaitan dengan efektivitas implementasi, organisasi, dan administrasi. Berbagai contoh permasalahan terkini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan PKH. Tentu saja permasalahan yang muncul tidak dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik program tersebut dilaksanakan. Akibatnya, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Tiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan efektivitas: sosialisasi, kuantitas, dan tepat sasaran.

Mengingat konteks di atas, maka penelitian ini mengambil judul tersebut “**Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kecamatan Panjang, Kelurahan Ketapang)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas dalam pelaksana Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Panjang, Kelurahan Karang Maritim Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Bagi akademis dapat menambah pengetahuan mengenai Efektivitas dari Program Keluarga Harapan yang diadakan di Kecamatan Panjang
2. Bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana proses dan efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panjang

Sebagai masukan untuk pemerintah agar berupaya terus meningkatkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan menjadi lebih baik lagi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Dalam sistem ekonomi apa pun, pemerintah memainkan peran penting. Peran pemerintah cukup signifikan dalam sistem perekonomian sosialis, namun sangat terbatas dalam perekonomian kapitalis, sebagaimana didefinisikan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith dalam (Antania, 2010) mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi :

1. Memelihara kemandirian serta pertahanan dalam negeri
2. Menyelenggarakan keadilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Fungsi pemerintah dalam perekonomian kontemporer secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, khususnya:

1.1 Peran Alokasi

Secara khusus, tanggung jawab pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya perekonomian yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi terhadap efisiensi produk. Pada dasarnya, sumber daya suatu negara terbatas. Pemerintah harus menentukan berapa banyak sumber dayanya yang akan digunakan untuk membuat barang publik, berapa banyak yang akan digunakan untuk memproduksi barang publik yang dibutuhkan oleh

penduduknya, berapa banyak yang harus diberikan oleh pemerintah dan berapa banyak yang dapat disediakan oleh perusahaan rumah tangga.

1.2 Peran distribusi

Peran pemerintah adalah pemerataan atau pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintah mendistribusikan sumber daya, peluang, dan hasil ekonomi secara adil dan setara. Peran pemerintah dalam penyaluran adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus membuat undang-undang untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan didistribusikan secara efektif.
- b. Untuk memastikan bahwa uang didistribusikan secara adil ke seluruh masyarakat, pemerintah harus membuat undang-undang.:
 1. Perpajakan
 2. Subsidi
 3. Pengentasan kemiskinan
 4. Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
 5. Bantuan pendidikan
 6. Bantuan kesehatan

1.3 Peran stabilisasi

Khususnya keterlibatan pemerintah dalam menjamin stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika tidak seimbang. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Hampir semua pemerintahan modern mendelegasikan kendali ekonomi kepada pihak/perusahaan swasta. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, menjaga agar perekonomian tetap berjalan lancar:

- 1). Memastikan bahwa kesulitan-kesulitan di satu bidang perekonomian tidak menular ke bidang-bidang lain.
- 2). Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :
 - a. Inflasi terkendali
 - b. System keamanan terjamin

c. Kepastian hukum terjaga

2. Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesobroto dalam (Mongan, 2019) Pengeluaran ini ditanggung oleh anggaran pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang mengatur perekonomian dengan menetapkan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) daerah tertentu.

2.1. Tolak ukur pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah ketika menjalankan peran alokasinya. Ada banyak tolok ukur untuk menentukan sejauh mana pemerintah mempengaruhi perekonomian. Patokannya adalah:

- a. Pengeluaran pemerintah
- b. Jumlah penerimaan pajak tenaga kerja
- c. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sector publik
- d. Jumlah unit organisasi pemerintah

Istilah "belanja negara" mengacu pada pendanaan untuk inisiatif penting pemerintah. Menurut Nudjaman A, 1992:11 dalam (Antania, 2010).

2.2 Jenis pengeluaran pemerintah

Pada hakekatnya belanja pemerintah pusat terdiri dari kas yang dialokasikan ke beberapa daerah. Alokasi pemerintah dibagi menjadi dua kategori.

a. Belanja pemerintah pusat yang meliputi :

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung upaya pelaksanaan rutin pemerintah disebut sebagai pengeluaran rutin. Ada lima kategori pengeluaran rutin: - Pengeluaran karyawan (gaji, pensiun, makan dan tunjangan perjalanan, dll.) - Pembelian komoditas (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll.). - Subsidi daerah otonom. - Pembayaran bunga dan utang (lokal dan internasional), serta biaya lainnya.

2. Pengeluaran pembangunan

Secara khusus, tujuannya adalah untuk memajukan kegiatan ekonomi di berbagai bidang seperti industri, pertanian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Mayoritas pengeluaran pembangunan digolongkan sebagai investasi dan dilakukan melalui proyek-proyek pembangunan. (T. Gilarso, 2004:29).

3. Konsep Efektivitas

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemanjuran, berbagai konsep akan dibahas di bawah ini. Selanjutnya menurut Fremont E. Kas (dalam sugiyono 2010:23) dalam (Maun, 2020) menyiratkan bahwa efektivitas berhubungan dengan tingkat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan tujuan tercapai. Sedangkan William N. Dunn menjelaskan (2005:498) Efektivitas adalah kriteria untuk memilih beberapa alternatif untuk digunakan sebagai rekomendasi tergantung pada apakah pilihan yang disarankan menghasilkan hasil (efek) terbaik, terlepas dari masalah efisiensi.

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan adanya efek atau hasil yang diinginkan. Ketika seseorang melaksanakan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau tujuan yang diharapkan, maka individu tersebut dikatakan efektif. (Gie 2006:149). Efektif dalam leksikon besar bahasa Indonesia mengacu pada kemampuan menghasilkan hasil. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memilih target kemajuan atau instrumen yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Handoko, 2008:7)

Menurut komarudin (2005:294) Efektivitas merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat keberhasilan upaya manajemen dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Siagian (2010:151) merasa bahwa kemandirian berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, atau apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai sudut pandang di atas, efektivitas lebih menitikberatkan pada ciri-ciri tujuan dan organisasi, oleh karena itu jika suatu organisasi berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, maka organisasi tersebut dapat disebut sukses. Oleh karena itu, efektivitas terutama difokuskan pada pemenuhan target yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai; apabila usaha atau hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan dikatakan efektif; jika tidak, dikatakan tidak efektif.

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa kemandirian dapat dinilai dari berbagai faktor, termasuk:

- a. Ketepatan dalam menentukan waktu: Penggunaan waktu yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuannya.

- b. Akurasi dalam penghitungan biaya: Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kekurangan keuangan atau anggaran hingga program selesai.
- c. Ketepatan pengukuran: Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan suatu program diperlukan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan untuk mengelola suatu program merupakan ukuran kemanjuran program tersebut.
- d. Ketepatan dalam memilih pilihan: merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan karena dalam memilih pilihan memerlukan prosedur yang rumit agar efektif.
- e. Ketepatan berpikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- f. Ketepatan dalam melaksanakan instruksi: merupakan kegiatan suatu organisasi atau individu yang mempunyai kapasitas memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami; jika perintahnya tidak dipahami maka implementasinya akan gagal dan tidak efektif.
- g. Akurasi dalam mencapai tujuan: Tujuan yang ditetapkan dengan benar akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- h. Keakuratan target dapat memengaruhi efektivitas operasi individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Suharto (2014:7) Penjelasannya, unsur-unsur yang mempengaruhi kinerja program mencakup empat kriteria, yaitu sasaran, tujuan, sosialisai, dan jumlah bantuan.

Hari Lubis dan Huseini berpendapat (2009:55), mencatat bahwa efektivitas merupakan gagasan penting dalam organisasi karena mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Akibatnya, sulit untuk menilai efektivitas karena adanya perbedaan dalam tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan itu sendiri.

4. Subsidi

Menurut M. Suparmoko dalam (Armansyah & Manurung, 2015) atau membeli barang-barang yang disubsidi pemerintah dengan harga lebih murah. Ada dua jenis subsidi: uang (bantuan tunai) dan subsidi produk atau natura.

4.1. Subsidi dalam bentuk uang

Subsidi jenis ini diberikan pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan pendapatan atau kepada produsen guna menurunkan harga barang. Konsumen mendapat manfaat dari bantuan moneter.:

- a. Kenikmatan atau kepuasan masyarakat bisa saja meningkat karena dengan adanya subsidi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat namun tidak membatasi pilihan barang mereka/konsumen.
- b. Jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi tunai jauh lebih rendah dibandingkan subsidi barang. Misalnya, pemerintah ingin membiarkan warganya (konsumen) membeli beras dengan harga diskon 50%, dan pemerintah membayar 50% biayanya agar program tersebut tidak berdampak pada petani.

4.2. Subsidi dalam bentuk barang

Subsidi dalam bentuk produk adalah subsidi yang diikatkan pada kategori komoditas tertentu, yaitu pemerintah membagikan jenis barang tertentu dalam jumlah tertentu kepada konsumen secara cuma-cuma atau dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Subsidi produk (dalam bentuk barang) mempunyai dampak sebagai berikut: Mengurangi frekuensi pembelian barang-barang yang disubsidi sekaligus meningkatkan konsumsi secara keseluruhan; Misalnya, pemerintah memberikan subsidi pangan secara cuma-cuma dengan syarat pengguna tidak boleh menjualnya kembali. (Suparmoko, 2003)

5. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (bappenas, 2004). Hak-hak dasar meliputi (a) ketahanan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, (c) perlindungan dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan (d) hak atas berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. (Badan Pusat Statistik).

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya pengentasan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan utama dan sekunder, serta terbentuknya komitmen dunia untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk. Todore, et al (2015) mengklaim bahwa meningkatnya kemiskinan dan tingginya angka kemiskinan merupakan akar dari semua permasalahan pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang mempengaruhi banyak elemen kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial budaya, psikologis, teknis, dan faktor-faktor lain yang saling berhubungan. (yunus:2007).

Menurut edi Suharto (2007:147) dalam (Prasetyo, 2019). Empat elemen utama tipologi kemiskinan adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan budaya, dan kemiskinan struktural.

a. Yang dimaksud dengan kemiskinan absolut adalah keadaan yang ditentukan oleh suatu indikator tunggal atau gabungan, misalnya gizi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan pokok, atau gabungan beberapa variabel. Kemiskinan absolut biasanya dievaluasi menggunakan batas kemiskinan atau garis kemiskinan. Untuk mempermudah pengukuran, metrik ini biasanya

diubah menjadi satuan moneter (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok individu yang kemampuan ekonominya berada di bawah garis kemiskinan tergolong miskin total.

b. Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai situasi buruk yang dialami oleh individu atau kelompok dibandingkan dengan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Jika garis kemiskinan, katakanlah, Rp30.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang berpenghasilan Rp75.000 per bulan belum sepenuhnya miskin; Padahal jika rata-rata pendapatan masyarakat setempat sebesar Rp. 100.000, maka individu tersebut dianggap agak miskin.

c. Kemiskinan kultural didefinisikan sebagai sikap, gaya hidup, dan nilai-nilai seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan modernisasi. Contohnya termasuk kemalasan, kurangnya ambisi, fokus pada masa lalu, dan kurangnya kewirausahaan.

d. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh kelainan atau ketidakadilan struktural, termasuk pengaturan politik dan ekonomi yang menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk mengakses sumber pendapatan yang dapat diakses. Prosedur dan praktik monopoli dan oligopoli di bidang ekonomi, misalnya, menciptakan siklus “kemiskinan” yang tidak dapat dipatahkan. Betapapun besar tekad dan kerja keras seseorang, dalam kerangka seperti itu, mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari rantai kemiskinan karena aset dan akses terhadap sumber daya yang ada dikuasai oleh kelompok tertentu. Petani tidak memiliki atau memiliki sedikit lahan, nelayan tidak memiliki perahu, dan pekerja, bahkan mereka yang berada dalam kemiskinan struktural, tidak memiliki akses terhadap tenaga kerja tidak terampil. (Edi Suharto, 2007:147)

Konsep kemiskinan mengacu pada kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-makanan. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila kehidupannya berada dalam keadaan

serba kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Garis kemiskinan yang setara dengan jumlah kebutuhan rupiah mencerminkan batasan minimal kebutuhan pokok. (Badan Pusat Statistik).

6. Program Keluarga Harapan

6.1 Pengertian

Program Bantuan Langsung Tunai (DCAT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bukanlah hal yang sama, dan program BLT yang selama ini berjalan juga bukan merupakan kelanjutannya. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan saat ini dengan menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini memberikan dukungan keuangan bersyarat untuk memenuhi standar pendidikan dan kesehatan.

6.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah mengurangi dan memutus siklus kemiskinan, memperluas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. (Londah et al., 2018). Selain itu, PKH mempunyai berbagai tujuan lain, baik secara tersurat maupun secara umum.:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi anak-anak RTSM

6.3 Sasaran Penerima Bantuan PKH

Keluarga atau individu yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan kemiskinan yang mencakup komponen

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial menjadi sasaran PKH, sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri ini. Peraturan Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH.

6.4 Komponen Keluarga Harapan

Sesuai peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan harus mempunyai kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan sebagai tiga komponen utamanya.

Komponen Kesehatan terdiri dari :

- a. Wanita Hamil atau menyusui
- b. anak berusia antara 0 dan 6 tahun

Komponen Pendidikan terdiri dari :

- a. anak-anak usia sekolah dasar atau sederajat
- b. anak-anak usia sekolah menengah pertama atau sederajat
- c. anak-anak usia sekolah menengah atas atau sederajat
- d. anak-anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Komponen Kesejahteraan terdiri dari :

- a. Lansia mulai dari 60 tahun
- b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

6.5 Besaran bantuan Program keluarga Harapan

PKH berupaya memberikan akses kepada keluarga kurang mampu terhadap berbagai layanan kesehatan dan pendidikan, serta inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Inisiatif ini memberikan optimisme bahwa keluarga prasejahtera mungkin bisa keluar dari kemiskinan di masa depan. Menteri Sosial akan memberikan bantuan pada program PKH ini, yang besarnya berbeda-beda tergantung beratnya kewajiban masing-

masing rumah tangga penerima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH.

Tabel 5. Kriteria Penerima PKH

No	Penerima PKH	Indeks/Pertahun	Indeks/Per3bulan
1	Ibu Hamil/Nifas	Rp3.000.000/Tahun	Rp750.000/Bulan
2	Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp3.000.000/Tahun	Rp750.000/Bulan
3	Anak SD/Sederajat	Rp900.000/Tahun	Rp225.000/Bulan
4	Anak SMP/Sederajat	Rp1.500.000/Tahun	Rp375.000/Bulan
5	Anak SMA/Sederajat	Rp2.000.000/Tahun	Rp500.000/Bulan
	Penyandang Disabilitas		
6	Berat	Rp2.400.000/Tahun	Rp600.000/Bulan
7	Lansia 70 Tahun keatas	Rp2.400.000/Tahun	Rp600.000/Bulan

Sumber: Pkh.Kemensos.go.id 2020

6.6 Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat PKH

a. Hak Keluarga Penerima PKH, berikut contoh program dukungan pelengkap;

1. Bantuan social bagi penerima PKH
2. Pendampingan sosial PKH
3. Pelayanan di lembaga kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial dan
4. Program bantuan komplementer di Bidang Kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Keluarga Penerima PKH

1. Komponen kesehatan mencakup anak usia dini (0–6 tahun) yang bersekolah dan harus diperiksa kesehatannya di fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan peraturan kesehatan, serta ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui.

2. Anak usia sekolah yang harus belajar setahun penuh dan mengikuti kegiatan pendidikan dengan tingkat kehadiran minimal 85% hari belajar produktif merupakan komponen pendidikan.
3. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lansia dan/atau penyandang disabilitas berat. Peserta dalam kegiatan ini minimal setahun sekali dan keikutsertaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Setiap bulannya, KPM mengikuti peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) atau pertemuan kelompok.
5. Sanksi dikenakan kepada seluruh anggota KPM yang tidak melaksanakan komitmennya. Pedoman untuk menerapkan verifikasi komitmen memberikan rincian tambahan tentang sistem hukuman.
6. KPM yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya akan menghadapi konsekuensi. Petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai sistem hukuman.

B. Tinjauan Empirik

Tabel 6. Perbandingan Beberapa Penelitian

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto, Carmia Diahloka	Menggunakan metode penelitian deskriptif , pendekatan kualitatif.	Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Lowokwaru, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik sampai sekarang ini. 2) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan anak Rumah tangga sangat miskin. Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat para pendamping PKH dapat menjalankan proses pelaksanaan.
2	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir	Apando Ekardo, Firdaus & Nilda Elfemi	Penelitian dilakukan dengan kualitatif tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive.	penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dalam penentuan sasaran PKH belum tepat sasaran meskipun telah tepat tujuan. Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan karena masih ada ditemukan di lapangan masyarakat yang dikategorikan ekonomi menengah ke atas mendapat bantuan PKH,

				penentuan sasaran tidak hanya melihat kondisi ekonomi yang tidak mampu, namun melihat adanya hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat setempat. Jadi pelaksanaan Program belum terlaksana dengan baik, ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah.
3	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari, MS	Menggunakan metode penelitian deskriptif , pendekatan kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rowosari dalam setiap kriteria yaitu ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan biaya dan ketepatan berpikir yang digunakan dalam penelitian belum sepenuhnya efektif. Di dalam kriteria ketepatan sasaran, terdapat sasaran yang belum tercakup menjadi keluarga penerima 15 manfaat, hal ini terjadi pada komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di dalam kriteria ketepatan tujuan, baik keluarga penerima manfaat, pendamping PKH maupun pihak terkait telah berusaha untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan efektif, tetapi nyatanya masih terdapat tujuan belum dapat sepenuhnya efektif.
4	Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Greaccela Alda Rahma, Siti Maizzul	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian pada data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai di Desa Jeruk Legi khususnya Dusun Sudimoro memiliki tingkat Coverisasi sebesar 22,3% hasil ini diukur berdasar pada pendapatan rerata warga Non-PKH yang menerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 2.669.230,- dengan rerata pengeluaran sebesar Rp. 2.984.615,- dapat dilihat ada selisih dimana pengeluaran

				<p>melebihi pendapatan sebanyak rata-rata Rp. 315.384,- yang kemudian dicover oleh pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 600.000,- yang kemudian selisih tersebut menjadi sisa tambah setelah pengcoveran dengan rata-rata Rp. 284.615,-. Hal ini juga menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH selama Covid19 berhasil dalam mencapai tujuan Coverisasi 10%</p>
5	Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Aceh timur	Junaidi Kariono	Ordinary Least Square dan data primer melalui wawancara secara langsung	<p>Program BLT kembali digulirkan pemerintah pada tahun 2008. Pelaksanaan penyaluran BLT kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk Rumah Tangga Sasaran. Tujuan dari program BLT bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah : (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.</p>
6.	Bantuan Langsung Tunai	Irwan Akib, Risfaisal	Menggunakan metode penelitian deskriptif , pendekatan kualitatif, dan deskriptif. Menggunakan teknik purposive sampling	<p>dampak bantuan langsung tunai terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah bantuan langsung tunai ini dianggap tidak efektif dan efisien karena kurang membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat hal ini disebabkan masyarakat menggunakan dana tersebut bukan untuk jangka panjang atau bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dampak lainnya</p>

yaitu masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai karena masyarakat terus mengharapkan bantuan dari pemerintah.

7	Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)	Hastina Fenriaty, Mistia	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan Progrm BLT dalam melakukan verifikasi data ulang masyarakat miskin tahap berikutnya agar pemerintah mengetahui ada atau tidaknya penurunan angka kemiskinan masyarakat miskin di Kecamatan Medan Marelan Kelurahan Tanah Enam Ratus dan Tim pelaksana teknis BLT tingkat kelurahan harus menetapkan RTS yang berhak mendapatkan program BLT berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS yang telah tersusun di petunjuk pelaksana teknis BLT.
8.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di desa Cibadak	Fika Nurahmawati, Sri Hartini	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil dari kuisisioner ke 1 menunjukkan bahwa 80% warga Cibadak Raya Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sudah menerima bantuan dari Pemerintahbagi warga terdampak covid-19. Hasil dari kuisisioner ke 2 menunjukkan 80% cukup terbantu dengan pembagian bantuan dari pemerintah ini. Hasil dari kuisisioner ke 3 menunjukkan bahwa bantuan dari pemerintah terdampak covid didesa ini tidak hanya berupa uang tunai akan tetapi lebih banyak juga warga juga yang mendapatkan sembako. Yaitu 40% penerima bantuan berupa BLT sementara 60% penerima bantuan berupa sembako.

9	Kemiskinan dipedesaan, peran pekerja sosial	C Strydom, ME tlojane,	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakatnya berada dalam kemiskinan, tingkat pendidikan mereka sangat rendah bahkan 50% kepala rumah tangga tidak sekolah. Kondisi rumah mereka tidak memnuhi standar dan tidak mempunyai air bersih. Kemiskinan disana juga menyebabkan kesehatan yang buruk dan gizi yang buruk
---	---------------------------------------------	------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kerangka Pemikiran

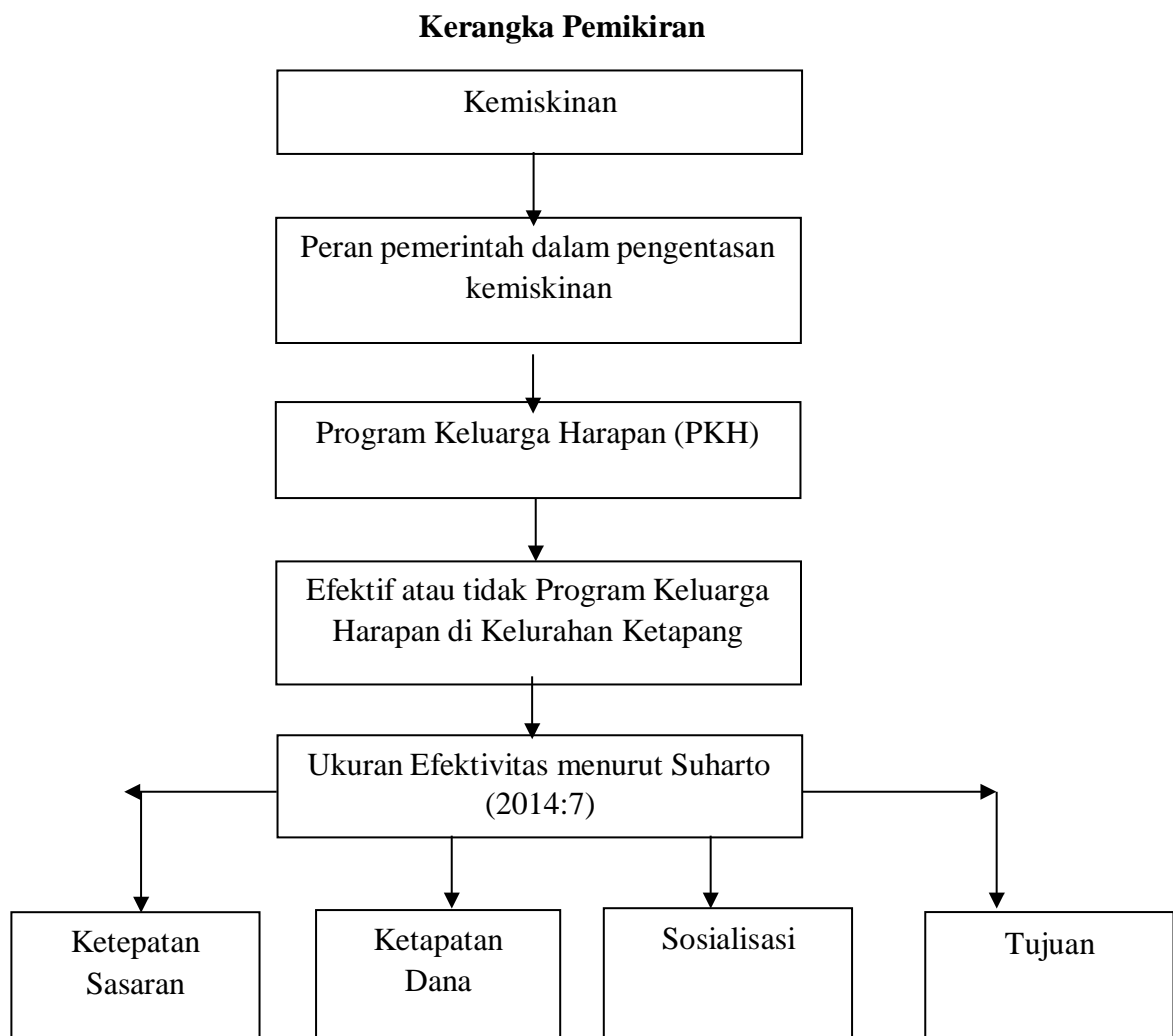
Kerangka pemikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep konsep atau variabel tersebut.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi. Menurut Mudrajad Kuncoro Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Untuk itu dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membuat suatu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai nilai tertentu yang ditunjukkan untuk memecahkan persoalan publik. Persoalan publik tersebut adalah kemiskinan. Kementerian Sosial menekankan agar mengucuran PKH ini dapat diterima oleh orang yang benar benar tepat. Walaupun kebijakan ini tidak 100 persen mampu melindungi masyarakat

miskin. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung.

Program PKH ini bisa dikatakan Berhasil apabila masyarakat yang menerima manfaat dari subsidi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin apabila pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap para penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panjang. Dipilihnya kecamatan Panjang kelurahan Ketapang sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan Kelurahan Ketapang Menjadi Kelurahan dengan penerima PKH terbanyak yaitu sebanyak 206 populasi penerima PKH.

B. Jenis penelitian

Data primer merupakan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dengan alat yang telah diatur sebelumnya. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan komponen internal proses penelitian yang sering diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena detailnya. Indriantoro dan Supomo di Purhantara. (2010:79).

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau biasa disebut (Field Research). Menurut (Fathoni Abdurahman, 2006) Penelitian lapangan dilakukan di tempat yang akan menjadi subjek penelitian, disebut juga lapangan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh gejala yang terlihat di lokasi penelitian. Jawaban dikumpulkan melalui hasil wawancara seperti menanyakan secara fisik kepada objek yang akan dijadikan sampel dan memberikan kuesioner dengan pertanyaan terstruktur kepada Rumah Tangga

Miskin dalam hal ini objek penerima bantuan PKH. Data yang diperlukan untuk mengirimkan survei kepada rumah tangga kurang mampu adalah:

1. Identitas responden yang mengacu kepada pekerjaan dan penghasilan dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Informasi Ketepatan Sasaran Penerima PKH.
3. Informasi Ketepatan Jumlah Besaran Dana PKH.
4. Informasi Ketepatan Sosialisasi PKH.
5. Informasi Ketepatan Dalam Mencapai Tujuan PKH.

C. Alat Analisis

Penulis menggunakan analisis bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian untuk menggambarkan fenomena yang ada, sedang terjadi atau telah terjadi sebelumnya. Menurut (Furchan, 2004) Sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan tabel untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu kejadian atau fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan rumus atau ketentuan matematika, yang diubah menjadi simbol atau angka. Untuk mengukur data yang dikumpulkan, tanggapan kuesioner responden harus diubah menjadi nilai numerik.

Dalam analisis responden, variabel penelitian yang berkaitan dengan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Panjang Kabupaten Ketapang diukur dengan menggunakan skala ordinal, dan setiap item pertanyaan dalam kuesioner dijadikan pilihan. Respon berjenjang bergantian dimulai dari tingkat tertinggi (skor 3) dan tingkat terendah (skor 1). Respon kuesioner responden harus diubah ke dalam bentuk numerik untuk memperoleh data kualitatif, dengan jawaban yang tersedia dievaluasi secara bertahap dari yang tertinggi hingga yang terendah. Banyaknya responden yang menjawab pertanyaan dapat digunakan untuk menentukan apakah tujuan dari suatu aspek pertanyaan sudah benar. Ketentuan pilihan jawaban:

1. nilai 1 untuk alternatif jawaban yang memiliki kategori rendah yaitu a
 2. nilai 2 untuk alternatif jawaban yang memiliki kategori sedang yaitu b
 3. nilai 3 untuk alternatif jawaban yang memiliki kategori tinggi yaitu c
- dasar menjadi alasan penulis memilih 3 alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan adalah agar hasilnya mudah diolah.

Tabel 7. Alternatif Ketentuan Pilihan Jawaban

NO	Variabel	Indikator	Sub-Indikator
1.	Ketepatan Sasaran: <i>Sumber BPS 2020</i>	1. luas lantai rumah	1. Ukuran lantai rumah maksimal 8m ²
		2. Sumber air minum	2. sumber air minum berasal dari air sumur
		3. Makan dalam sehari	3. Frekuensi makan dalam sehari yaitu 1-2x sehari
		4. Fasilitas kesehatan	4. Ketidakmampuan anggota keluarga berobat ke puskesmas
		5. Sumber protein	5. Pemenuhan sumber protein seperti daging, susu, ayam 1kali dalam seminggu
		6. Fasilitas kamar mandi	6. Tidak memiliki fasilitas kamar mandi atau bersama sama dengan rumah tangga lain
		7. Pembelian Pakaian	7. Pembelian pakaian baru 1 kali dalam setahun
		8. Alat memasak	8. Penggunaan alat kompor menggunakan kayu bakar/minyak tanah
2.	Ketepatan Dana: <i>Sumber Ruri Antania (2010)</i>	1. Manfaat PKH sebagai pemenuhan hidup	Pemenuhan seperti pembiayaan dibidang pendidikan maupun kesehatan

		2. Dana yang diberikan tepat waktu yang telah ditentukan	2. Dana yang diberikan biasanya dicairkan pada bulan januari, april, juli, dan september
		3. Jumlah dana sama rata	3. Pemberian jumlah dana yang diberikan sama rata sesuai dengan kriteria penerima PKH : - Ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun sebesar 750.000/3bulan - Anak sd sebesar 225.000/3bulan - Anak smp sebesar 375.000/3bulan - Anak sma sebesar 500.000/3bulan
		4. Dana PKH sebagai pemenuhan kebutuhan hidup	4. dana pkh yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan
3.	Sosialisasi PKH: Sumber Dhewi, 2019	1. Pendamping memberikan sosialisasi	1. Para pendamping aktif dalam memberikan sosialisai mengenai PKH dan juga informasi informasi mengenai PKH
		2. Pendamping mendengarkan aduan peserta PKH	2. Para pendamping selalu bersedia dalam mendengar keluh kesah peserta PKH seperti (jika) telatnya dana bantuan pkh, ataupun kendala kendala dalam penerimaan bantuan PKH

Kaidah keputusan dalam penelitian Virginia dkk (2020) adalah sebagai berikut:

1. 75 – 100 = Sangat Efektif
2. 50 – 74 = Efektif
3. 24 – 49 = Kurang Efektif
4. 0 – 24 = Tidak Efektif

Kemajuan Program Keluarga Harapan secara keseluruhan akan ditentukan dengan menerapkan aturan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kriteria tersebut juga akan mengidentifikasi fase-fase kelemahan yang tersisa.

D. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diterima atau dikumpulkan langsung dari lapangan atau dari sumber aslinya, bukan melalui perantara. Data sekunder mengacu pada data penelitian yang diterima secara tidak langsung melalui media perantara atau dikumpulkan atau dicatat oleh pihak ketiga. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat penerima PKH di Kecamatan Panjang dan Ketapang. Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang mendukung penelitian ini dan diperoleh dari otoritas lain seperti Badan Pusat Statistik.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dikenal sebagai metode pengumpulan data. Selain itu, tujuan teknis metode pengumpulan data adalah untuk memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi sehingga nilai numerik dapat dikaitkan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini metode metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan terencana dan sistematis dan melalui pengamatan atau penglihatan terhadap suatu hal hal yang terjadi. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran luas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang mungkin digunakan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut adalah melalui wawancara. Responden ditanyai secara pribadi untuk mendapatkan data ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini adalah dengan melakukan studi literatur dari berbagai media seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mencatat setiap data pendukung penelitian yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjng.

4. Angket dan Kuisisioner

Seperangkat pertanyaan (kuesioner) dengan jawaban pilihan ganda diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data. Berdasarkan sampel yang diberikan, responden dalam hal ini berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah yang mendapatkan bantuan keuangan langsung.

Tempat penelitian adalah tempat peneliti mengumpulkan informasi mengenai data yang relevan. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian akan dilakukan. Pendekatan pemilihan wilayah bersifat terarah, yaitu disengaja, dan didasarkan pada pra-survei yang dirancang untuk mencapai tujuan studi. Kecamatan Panjang dan Ketapang Kota Bandar Lampung akan menjadi lokasi kajian data primer.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kategori luas dari hal-hal atau individu dengan atribut dan karakteristik tertentu yang dipilih peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sugiono (2016:80). jumlah keseluruhan item atau subjek dengan sifat dan sifat tertentu yang dipilih peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel merupakan salah satu dari populasi yang dapat diharapkan untuk mewakili populasi peneliti. Dan untuk menghasilkan sampel yang dapat mewakili ciri-ciri populasi, diperlukan prosedur pemilihan sampel yang sesuai. Informasi yang dikumpulkan dari sampel harus mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan. Untuk mencari sampel minimal yang diperlukan, digunakan pendekatan rumus Slovin dengan menggunakan rumus berikut.:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n=Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

e= Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir.

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 90, e ditetapkan sebesar 10%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{206}{1 + (206 \times 0,1)^2}$$

$$n = 67$$

Besar sampel penelitian ini adalah 67 orang peserta bantuan PKH yang berasal dari Kecamatan Panjang Desa Ketapang.

Pendekatan pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan kriteria dan

sampel tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2008). Penerima bantuan PKH di Kecamatan Panjang Desa Ketapang dijadikan kriteria penelitian. Sampel penerima PKH sebanyak 67 orang dipilih dari populasi sebanyak 206 orang.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan pasca pengumpulan. Dalam penelitian kuantitatif. (Bungin, 2006), Pengolahan data seringkali dilakukan secara bertahap:

1. Editing merupakan proses perbaikan kekurangan pada data yang harus dilakukan secara berkala dan hati-hati. Langkah pengeditan diterapkan pada catatan, file, dan materi yang diperoleh peneliti, serta survei, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan keandalan data yang akan diperiksa. (Asikin dan Amirudin, 2004). Pada saat penyuntingan, kelengkapan jawaban seluruh pertanyaan kuesioner akan diperiksa ulang.
2. Pengkodean atau coding dan pemberian skor digunakan untuk menyederhanakan data, seperti memberikan simbol numerik pada setiap jawaban atau mengkategorikan jawaban responden terhadap suatu pertanyaan berdasarkan jenisnya dengan memberikan kode tertentu pada setiap jawaban. (Suyanto dan Sutinah, 2006).
3. Setelah dilakukan penyuntingan dan pengkodean, tabulasi merupakan langkah lanjutan dalam pengolahan data yang mengacu pada kegiatan menyusun data dalam bentuk tabel guna mempermudah analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel ini berbentuk tabel dan diberikan dalam persentase.

H. Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas mengacu pada apakah kita mengukur apa yang ingin kita ukur. (Asep Hermawan, 2005:126). Validitas adalah ukuran validitas atau reliabilitas suatu instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur akurat, dapat diandalkan, atau konsisten dalam mengukur apa yang diukurinya. Uji korelasi Pearson product moment digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini, beserta kriterianya. Jika r hitung melebihi r tabel (r hitung $>$ r tabel), maka data dianggap sah.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Asep Hermawan, konsistensi, presisi, dan prediktabilitas suatu instrumen merupakan faktor yang berkontribusi terhadap Reliabilitas. Sementara (Ghozali, 2006) menjelaskan bahwa uji reliabilitas adalah suatu metode untuk mengevaluasi suatu kuesioner. Suatu kuesioner dianggap dapat diandalkan jika tanggapan responden terhadap suatu pertanyaan tetap konstan atau konsisten sepanjang waktu. Ada dua metode untuk mengukur keandalan:

Pertama, one shoot atau pengukuran tunggal dilakukan, dan temuannya kemudian dibandingkan dengan pertanyaan tambahan atau digunakan untuk menghitung korelasi antara respons terhadap pertanyaan. Menggunakan SPSS untuk menghitung reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dianggap dapat diandalkan jika nilai Cronbach Alpha-nya melebihi 0,60.

Kedua, pengukuran berulang atau repeat measure, juga dikenal sebagai penilaian berulang, melibatkan menanyakan pertanyaan yang sama kepada subjek beberapa kali dan melihat apakah respons mereka tetap konstan. Namun, pengukuran awal—yaitu, satu kali pengambilan gambar atau pengukuran tunggal—adalah satu-satunya yang digunakan para peneliti dalam penelitian ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi di Kota Bandar Lampung, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Pelaksanaan PKH dilihat dari Ketepatan sasaran telah berjalan efektif dengan persentase pencapaian sebesar 54,6%. Hal ini ditinjau dari luas lantai bangunan, sumber air minum, frekuensi makan sehari, ketidakmampuan membayar anggota ke puskesmas, pemenuhan sumber protein, fasilitas kamar mandi, jumlah pembelian pakaian, dan penggunaan alat memasak.
2. Menurut ketepatan dana PKH dalam pelaksanaannya sudah efektif berjalan dengan persentase sebesar 72,76%. Yang ditinjau dari kegunaan dana yang diberikan, proses pencairan dana, jumlah dana PKH, dan jumlah dana PKH dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari pemanfaatan uang PKH untuk meringankan biaya sekolah dan kesehatan, serta prosedur pencairan tunai PKH yang berjalan dengan baik.
3. Kemudian dilihat dari Sosialisasi PKH Kesimpulan yang didapat yaitu kegiatannya secara efektif berjalan dengan persentase 73,31%. Yang ditinjau dari keaktifan pendamping dalam memberikan informasi, sosialisasi maupun mendengar aduan dari peserta PKH.

B. Saran

1. Ketika memilih peserta PKH, sebaiknya orang-orang tersebut berasal dari keluarga yang benar-benar miskin dan tidak mampu mencapai kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
2. Dana yang diberikan pemerintah dalam program PKH ini sebaiknya digunakan dalam hal hal yang menjadi indikator PKH ini seperti di bidang pendidikan dan kesehatan hal ini agar tujuan PKH dapat tercapai dan merasakan dampak positifnya.
3. Mengenai sosialisasi PKH agar para pendamping lebih aktif lagi dan memberikan arahan yang lebih baik lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar penerima PKH dan panitia PKH

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. *Tnp2K*, 1–36.
- Antania, R. (2010). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus: Penerima BLT di Kelurahan Way Halim Permai Sukarame Tahun 2008/2009) *Digilib.Unila.Ac.Id*.
- Armansyah, & Manurung, S. (2015). Kontribusi Subsidi Langsung Tunai dalam Menopang Kebutuhan Hidup Masyarakat Miskin di Medan Labuhan Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 36–52.
- Aulia, N. F. (2017). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat di Desa Bojong Kecamatan Pamengungpeuk Kabupaten Garut.
- Budiadnyana, I. N., & Sandisa, G. (2017). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 8(1), 1–13
- Burhanuddin. (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *Repository.Ummat.Ac.Id*, February, 6.
<https://repository.ummat.ac.id/1946/1/COVER-BAB I-III.pdf>

- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1.1140>
- Elia, F. A. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 15–42. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>
- (Furchan, 2004). Metode Penelitian Deskriptif Untuk Skripsi
- Ghofur, A. (2019). Analisis Dampak Pemanfaatan Dana PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Praja Lamongan*, 2(2), 47–55.
- Irmawati, L. (2016). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Skripsi. 4(2), 130–154.
- Kementerian Sosial. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021. In KEMENSOS (p. 76)
- Londah, A. A., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1689–1699.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Morissan, M. A., & Andy Corry, W. (2012). Farid Hamid. Metode Penelitian Survei.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Prasetyo, E. dan S. M. (2019). Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Https://Eprints.Umm.Ac.Id/44169/3/Jiptummpp-Gdl-Achmadabul-51776-3-Babii.Pdf*, 1–23.
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru.
- Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Tlonaen, Y. B., Hardianto, W. T., & Diahloka, C. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 29–37.
- Wagstaff, S. D. R. (2013). Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI*, 49–57. http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Hubungan_Kesehatan_dan_Ke_miskinan20130611103510.pdf

